

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi sektor publik adalah untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang memengaruhinya (Haryanto, dkk. (2017: 1))

Menurut Halim (2002:143) akuntansi sektor publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan. Sektor publik merupakan sektor-sektor yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat, dimana pelaksanaan utama dari tujuan organisasinya yaitu tidak mencari keuntungan keuangan. Jadi organisasi tersebut umumnya dimiliki secara kolektif secara publik dan kepemilikan atas sumber dayanya tidak dicerminkan dalam bentuk saham yang dapat diperjual belikan. Mekanisme pengambilan keputusan publik atas kebijakan dan operasi organisasi dilakukan atas dasar kesepakatan bersama (Bastian, 2010).

Kinerja pemerintah daerah merupakan cerminan dari kemampuan pemerintah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya untuk memberikan layanan publik yang berkualitas serta mencapai tujuan pembangunan daerah. Penilaian kinerja pemerintah daerah meliputi berbagai aspek, seperti

efisiensi penggunaan anggaran, efektivitas pelaksanaan program, kepatuhan terhadap peraturan, serta kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Dalam konteks pemerintahan kinerja tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga keberhasilan dalam merespons kebutuhan masyarakat secara langsung. Faktor-faktor seperti kecepatan penyelesaian urusan administrasi, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta inovasi dalam pelayanan publik menjadi indikator penting dari kinerja pemerintah daerah.

Menurut Bastian (2021) kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Oleh karena itu kinerja organisasi layanan publik yang berkualitas akan mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintah dan kegiatan pembangunan di daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 8 Tahun 2006, Kinerja pemerintah didefinisikan sebagai hasil dari kegiatan dan program pemerintah yang hendak atau telah dicapai yang berhubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Sedangkan menurut Nordiawan (2010) kinerja pemerintah tidak bisa dilihat hanya dari sisi input dan output tetapi juga dari sisi *outcome*, manfaat dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Kinerja pemerintah adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi atau individu yang dapat ditunjukkan secara nyata dan dapat diukur. Untuk menambah kinerja keuangan pemerintah yang baik pada suatu periode tertentu menyangkut aspek

penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas.

Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggung jawaban yang penting atas segala aktivitas kegiatan dan harus bisa di pertanggung jawabkan kepada pihak yang memberi amanah. Pemerintah merupakan wakil rakyat atau masyarakat atau pihak yang diberi amanah oleh masyarakat. Jika pemerintah menjalankan amanah dengan baik, masyarakat akan percaya kepada pemerintah (Mardiasmo, 2012).

Akuntabilitas merupakan konsep pertanggung jawaban atas tindakan individual atau organisasi yang telah diamanatkan. Mengacu pada teori agensi, (Arifudin, 2016) Menyatakan bahwa akuntabilitas publik dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu (1) akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) yang artinya pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, maupun daerah kepada pemerintah pusat. (2) akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) yang diartikan sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat luas (Arifudin, 2016)

Laporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk pertanggung jawaban pegawai negeri kepada masyarakat mengenai kinerja pemerintah selama tahun anggaran dan pelaksanaan rencana strategis dalam

melaksanakan misi besar dan fungsi organisasi di setiap daerah menjelaskan. Keberhasilan layanan saat ini seharusnya mempercepat peningkatan kualitas layanan yang diharapkan pada tahun depan. Melalui penyusunan LAKIP juga dapat menjadi contoh penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yaitu mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan (Kaltsum & Rohman 2017). ada empat indikator akuntabilitas yaitu akuntabilitas kebijakan ,akuntabilitas program ,akuntabilitas proses dan akuntabilitas kejujuran dan hukum (Madiasmo,2009)

Kecamatan Peninjauan merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Provinsi Sumatera Selatan. Dari segi pemerintahan, Kecamatan Peninjauan dibentuk untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat di wilayah barat daya Kabupaten OKU. Kecamatan ini memiliki 16 desa yang tersebar di wilayah yang cukup luas, dan berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi lokal.

Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas ,dalam konteks pemerintahan daerah ,akuntabilitas menjadi faktor kunci yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah ,dengan adanya mekanisme akuntabilitas yang baik ,pemerintah daerah dapat lebih muda mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam pelaksanaan program .

Tabel 1.1
Hasil Pra Survey Akuntabilitas Di Kantor Camat Kecamatan Peninjauan
Kabupaten Ogan Komering ulu

No.	Pertanyaan	Jawaban	
		YA	TIDAK
Akuntabilitas hukum dan kejujuran			
1.	Di tempat saya bekerja di kantor camat peninjauan kurangnya jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang di isyaratkan dalam peraturan daerah terkait penggunaan sumber dana public	33%	67%
2.	Tidak adanya penyalahgunaan jabatan selama periode pemerintahan daerah	73%	27%
Akuntabilitas Proses			
1.	Prosedur sistem informasi yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik	93%	7%
2.	Prosedur administrasi yang digunakan dalam melakukan tugas sudah cukup baik	98%	2%
3.	Prosedur manifestasi melalui pemberian pelayanan publik cepat , responsif,dan murah biaya	98%	2%
Akuntabilitas program			
1.	Tujuan yang semula ditetapkan tercapai dengan baik	98%	2%
2.	Adanya pertimbangan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal	86%	14%
Akuntabilitas kebijakan			
1.	Adanya pertanggung jawaban atas kebijakan kebijakan yang diambil terhadap DPRD setempat	98%	2%
2.	Adanya pertanggung jawaban atas kebijakan kebijakan yang di ambil terhadap masyarakat luas	93%	7%

Sumber : Data diolah 2025

Tabel 1.2
Hasil Pra Survey Kinerja Pemerintah Daerah Di Kantor Camat
Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering ulu

No	Pertanyaan	Jawaban	
		YA	TIDAK
Kuantitas			
1.	Pentingnya tanggung jawab pada setiap tugas yang dilakukan selaku pegawai kantor camat	80%	20%
2.	Pentingnya disiplin yang harus dimiliki dalam melaksanakan tugas	95%	5%
3.	Kemampuan dalam melakukan kerja sama dengan pegawai lain sangat mendukung keberhasilan dalam menjalankan tugas	80%	20%
4.	Nilai nilai kejujuran yang dimiliki pegawai kantor camat sangat mendukung kepercayaan masyarakat dalam menjalankan tugas	80%	20%
Kualitas			
1.	Untuk mencapai hasil maksimal dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai kantor camat diperlukan kemampuan dalam pengambilan keputusan secara tepat dan cepat	95%	5%
2.	Untuk mencapai hasil maksimal dalam menjalankan tugas sebagai pegawai kantor camat diperlukan inisiatif dalam pengambilan keputusan	97%	3%
Ketepatan waktu			
1.	Saya mencapai hasil kerja berdasarkan waktu yang telah ditentukan	26%	74%
2.	Saya mampu memiliki hasil yang berguna dalam membantu penyelesaian pekerjaan yang lebih baik	80%	20%

Sumber : Data diolah 2025

Pada tabel 1.1 menunjukkan hasil bahwa masih “ kurangnya jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan daerah dalam penggunaan dana publik’

yang menunjukkan bahwa 67% responden menjawab “tidak” hal ini mengindikasikan lemahnya akuntabilitas hukum dan kejujuran ditandai dengan rendahnya transparansi dan potensi penyalahgunaan anggaran , dampaknya adalah menurunnya kepercayaan masyarakat, Solusi yang di perlukan meliputi peningkatan pengawasan ,penguatan etika dan kepatuhan hukum .

Pada tabel 1.2 menunjukkan hasil bahwa “ Saya mencapai hasil kerja berdasarkan waktu yang telah ditentukan” yang menunjukan bahwa 70% responden menjawab “tidak” hal ini mengindikasikan lemahnya ketepatan waktu yang ditandai dengan beban kerja yang tidak merata seperti tugas menumpuk dan banyak tugas tambahan seperti rapat dan pelaporan mendadak,dampaknya adalah penumpukan pekerjaan yang semakin parah dan penurunan kinerja instansi, solusi yang di perlukan pengawasan dan evaluasi kinerja yang lebih ketat.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang ada ,maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian “**Pengaruh Akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah di kecamatan Peninjauan**”

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Apakah ada pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah di kecamatan Peninjauan?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dalam penelitian ini Untuk mengetahui apakah akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah di kecamatan Peninjauan

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berkaitan dengan akuntabilitas yang dapat mempengaruhinya, serta dapat digunakan sebagai bahan referensi dan data pendukung bagi peneliti- peneliti lainya yang tertarik pada bidang kajian ini.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah daerah

Diharapkan Penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pengembangan lembaga pemerintah daerah kabupaten ogan komering ulu khususnya di kecamatan peninjauan.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat menambah wawasan , kemampuan berpikir , menganalisa dan pengetahuan peneliti, khususnya dibidang penelitian tentang pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah.